



Implementasi Tata Kelola Keuangan Pendidikan dalam Program ‘Aje Kendor Sekolah’ Kota Serang

Farda Fahira^{1*}, Laeli Nur Khanifa², Nisaul Istiqomah³, Juwita Siregar⁴,
Azizah Vara Ramadhansyah⁵

¹⁻⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Indonesia

6670230103@untirta.ac.id^{1*}, LaeliNurKhanifa@untirta.ac.id², 6670230102@untirta.ac.id³,
6670230101@untirta.ac.id⁴, 6670230162@untirta.ac.id⁵

Alamat Kampus: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

Korespondensi penulis: 6670230103@untirta.ac.id

Abstract: *The implementation of educational financial management is crucial as part of the commitment to progress that is the focus of this study, with the aim of examining financial management based on the principles of effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in the 'Aje Kendor Sekolah' program using Public Financial Management Theory and Policy Implementation Theory. This study uses a qualitative research method with Creswell's case study approach. The research findings indicate that budget management aligns with formal procedures, but planning is not yet fully participatory. The reporting system is structured, but community involvement in oversight remains symbolic. The presence of collaboration among various stakeholders has not addressed the shortages in facilities and funding. Therefore, these shortages need to be addressed to encourage sustained school participation in the future.*

Keywords: *Public Financial Management, Policy Implementation, Education, Aje Kendor School*

Abstrak: Implementasi pengelolaan keuangan pendidikan menjadi krusial sebagai bagian dari komitmen terhadap kemajuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan tujuan mengkaji pengelolaan tata kelola keuangan yang mendasar pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pada program ‘Aje Kendor Sekolah’ dengan menggunakan Teori *Public Financial Management* dan Teori Implementasi Kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus Creswell. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian pengelolaan anggaran dengan prosedur formal, namun perencanaan belum sepenuhnya partisipatif. Sistem pelaporan telah terstruktur tetapi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih bersifat simbolik. Hadirnya kolaborasi berbagai *stakeholder* belum menutupi kekurangan fasilitas serta dana. Oleh karena itu, kedepannya kekurangan perlu menjadi perhatian untuk mendorong peningkatan partisipasi sekolah berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen Keuangan Publik, Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Aje Kendor Sekolah

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hal fundamental (Sadiah dkk, 2023; Gaol, 2023; Herlambang, 2021) sebagai gerbang menuju kemajuan sehingga perlu melibatkan berbagai aspek seperti politik, hukum, ekonomi, kesehatan, budaya, psikologi, sosial, hingga agama. Maka dari itu, kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dan pelaksanaannya (Herawan dkk, 2023) perlu sejalan dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Dengan demikian, pencapaian tujuan pendidikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat (Kholifah, et al. 2024). Pentingnya pendidikan disalurkan dengan menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Serang periode 2018-

2023 sebagaimana tercantum dalam visi besar RPJMD: “Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya”.

Namun, hingga akhir masa RPJMD tersebut, kemajuan di sektor pendidikan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang yang hanya mengalami peningkatan dari 73,48 pada tahun 2023 menjadi 73,99 pada tahun 2024 (Hendianingsih, et al. 2024). Selain itu, indikator pendidikan lainnya seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih berada pada tingkat yang rendah yaitu pada usia 25 tahun ke atas di tercatat sebesar 8,91 tahun, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk Kota Serang menempuh pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan dua tahun di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Meskipun mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, RLS Kota Serang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten yang mencapai 9,15 tahun pada tahun yang sama. Perbandingan ini menempatkan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berada di peringkat kelima dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten dalam hal RLS. Kota Tangerang Selatan memimpin dengan RLS tertinggi sebesar 11,85 tahun, diikuti oleh Kota Tangerang (10,91 tahun), Kota Cilegon (10,38 tahun), Kabupaten Tangerang (8,93 tahun), Kota Serang (8,91 tahun). Sementara itu, Kabupaten Lebak mencatat RLS terendah sebesar 6,6 tahun. Ini menunjukkan bahwa RLS Kota Serang berada pada posisi keempat terendah se-provinsi Banten.

Berdasarkan data Dapodik Kemdikbud RI, terdapat sekitar 8.798 anak yang tidak bersekolah di wilayah Kota Serang. Meskipun 99,6% anak usia 7–12 tahun terdaftar di sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun signifikan pada usia 13–15 tahun (94,9%) dan 16–18 tahun (61,9%), yang semuanya berada di bawah rata-rata provinsi. Dalam permasalahan pendidikan tersebut Pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk USAID ERAT dan bank milik pemerintah yaitu Bank Jabar Banten (BJB), dalam program "Aje Kendor Sekolah" yang bertujuan mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke bangku pendidikan di Kota Serang.

Salah satu faktor fundamental dalam keberhasilan sistem pendidikan adalah pengelolaan keuangan yang tepat sasaran (Wahyudin, 2020). Anggaran bukan hanya menjadi sumber daya pendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengintervensi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan (Kuntadi & Rusdiana, 2022). Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjangkau kelompok sasaran, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan atau berisiko tinggi putus sekolah.

Dalam mendukung tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel, terdapat sejumlah regulasi nasional yang menjadi dasar hukum pengelolaan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyebutkan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk anggaran pendidikan yang menjadi Pemerintah Kota Serang dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan, termasuk program “Aje Kendor Sekolah”.

Di tingkat daerah, pengelolaan keuangan pendidikan kerap menghadapi sejumlah tantangan dari perencanaan anggaran yang kurang partisipatif hingga lemahnya sistem pengawasan dalam realisasi anggaran melalui ketidaksesuaian antara prioritas dengan pola distribusi anggaran (Handraini dkk, 2024) sehingga dana yang tersedia tidak selalu menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen keuangan di lingkungan dinas pendidikan juga sering menjadi kendala, terutama dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam situasi seperti ini, tidak mengherankan jika berbagai program intervensi sosial pendidikan mengalami stagnasi atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, telah menetapkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD 2018–2023. Komitmen ini terefleksi melalui alokasi anggaran pendidikan yang cukup signifikan dalam APBD. Namun, dalam praktiknya, besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya dengan masih eksisnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang rendah dan tingginya angka anak tidak sekolah menunjukkan bahwa realisasi anggaran Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana pengelolaan keuangan pendidikan dijalankan, apakah telah tepat sasaran dan mampu menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam menelusuri pengembangan kerangka *Public Financial Management (PFM)* sebagaimana dikembangkan oleh Allen, Hemming, dan Potter ditemukan pentingnya tata kelola keuangan publik yang efektif untuk memperbaiki kinerja sektor publik, mengurangi risiko fiskal, dan meningkatkan akuntabilitas (Triwibowo, 2020; Nurfadila, 2024; Wenher &

Renzio, 2013). Dominasi pengaruh tata kelola keuangan yang baik dalam kemajuan, dapat dilihat melalui eratnya hubungan dengan korupsi sebagai bentuk kegagalan pengelolaan keuangan (Triwibowo, 2020). Sehingga perlu strategi peningkatan PFM salah satunya melalui evaluasi kinerja dan sistem biaya (Nurfadila, 2024) Oleh karena itu, *public financial management* perlu dikaji lebih dalam desain institusi fiskal dalam mendukung reformasi PFM di berbagai negara (Wenher & Renzio, 2013).

Melihat pentingnya program “Aje Kendor Sekolah” sebagai *respons* terhadap persoalan anak tidak sekolah di Kota Serang, perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana pengelolaan keuangan dalam program ini dijalankan. Efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci untuk menilai keberhasilan program ini dalam mendukung peningkatan akses pendidikan. Program ini dipilih sebagai studi kasus karena mencerminkan kolaborasi multipihak yang jarang dibahas secara mendalam dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, serta memiliki potensi untuk menjadi model kebijakan yang bisa direplikasi di daerah lain.

Penelitian ini mencoba mengangkat konstruksi *Public Financial Management (PFM)* yang juga berkaitan dengan implementasi kebijakan terutama dalam konteks pengelolaan dana pendidikan dalam program ‘Aje Kendor Sekolah’ Kota Serang. Hal ini menggambarkan perbedaan signifikan penelitian dengan mengkolaborasikan kedua teori diatas sebagai basis analisis serta pengambilan objek program beasiswa ‘Aje Kendor Sekolah’ Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten guna mendorong kemajuan melalui pendidikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Public Financial Management (PFM)*

Public Financial Management (PFM) merupakan keseluruhan sistem, proses, dan instrumen yang digunakan pemerintah untuk merencanakan, mengelola, mengalokasikan, membelanjakan, serta mempertanggungjawabkan dana publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Allen, Hemming, dan Potter, 2013). Pengelolaan keuangan publik tidak hanya perihal teknis administrasi keuangan, tetapi memiliki dimensi politis, sosial, dan ekonomi yang kompleks. PFM memandang keuangan publik sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan negara, memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional (Allen, Hemming, dan Potter, 2013).

PFM berfokus pada keseluruhan siklus keuangan pemerintah, yang meliputi perencanaan strategis anggaran, penyusunan anggaran, pengalokasian sumber daya, implementasi anggaran,

pelaporan keuangan, hingga pengawasan dan audit. Ciri khas utama dari PFM modern adalah penekanannya pada hasil (*outcome*), bukan hanya pada prosedur. Dengan kata lain, sistem keuangan yang dianggap sukses tidak semata-mata dinilai berdasarkan kesesuaian prosedur, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target pembangunan (Allen, Hemming, dan Potter, 2013).

Dalam praktiknya, *Public Financial Management* juga mengandung prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi anggaran kepada publik, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, akuntabilitas pejabat publik terhadap penggunaan dana, serta efisiensi dalam setiap tahapan pengeluaran keuangan negara (Allen, Hemming, dan Potter, 2013). Transformasi dalam genealogi *Public Financial Management* terjadi pada era 1980-an dengan munculnya gerakan *New Public Management (NPM)* yang membawa paradigma baru dengan prinsip-prinsip efisiensi seperti sektor swasta sehingga Fokus PFM kemudian bergeser dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi berorientasi pada hasil, kinerja, dan nilai tambah dari setiap pengeluaran publik (Allen, Hemming, dan Potter, 2013). Konsep seperti *performance-based budgeting*, *value for money*, dan *outcome budgeting* mulai diperkenalkan secara luas.

Dalam kerangka *Public Financial Management*, keberhasilan pengelolaan keuangan publik dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yakni:

1. Perencanaan anggaran yang partisipatif: keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran yang efisien: penggunaan sumber daya secara optimal dengan hasil maksimal.
3. Pelaporan dan transparansi: penyampaian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses publik.
4. Pengawasan dan akuntabilitas: sistem audit internal dan eksternal yang independen untuk menilai kebenaran dan efisiensi penggunaan dana.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor, baik individu, kelompok, atau lembaga, untuk mentransformasikan keputusan kebijakan menjadi hasil operasional yang nyata di lapangan. Penekanan bahwa implementasi bukan hanya soal "menjalankan" perintah, tapi melibatkan interpretasi, adaptasi, bahkan negosiasi antara banyak aktor. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak menjamin

keberhasilan implementasi tanpa memperhatikan siapa yang menjalankan, bagaimana dijalankan, dan dalam konteks apa kebijakan itu bergerak.

Van Meter dan Van Horn membangun teori ini sebagai respon terhadap model linear *top-down*, dengan lebih menyoroti variabel yang menghalangi atau memperlancar jalannya implementasi. Mereka memperkenalkan konsep "model interaktif implementasi": implementasi bukan satu arah (dari atas ke bawah), melainkan hasil dari interaksi antara tujuan kebijakan, kondisi lingkungan, dan perilaku pelaksana.

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi beberapa variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*): yang menunjukkan sejauh mana langkah-langkah yang menjadi dasar dan tercapainya tujuan kebijakan.
2. Karakteristik Badan Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*): bagaimana ciri-ciri badan pelaksana baik formal maupun informal
3. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*): Keberhasilan Implementasi dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition of Implementers*): keberhasilan atau kegagalan implementasi dipengaruhi bagaimana sikap pelaksana dari pengetahuan, pemahaman respon dan tanggapan dari para kebijakan.

Teori *Public Financial Management* dan Implementasi Kebijakan menjadi dasar analisis penelitian pelaksanaan program 'Aje Kendor Sekolah' baik dalam spektrum tata kelola keuangan maupun implementasi kebijakan. Konsep serta indikator kedua teori tersebut dapat penulis kolaborasikan guna memaksimalkan hasil penelitian sehingga dapat melihat sejauh mana kualitas dari proses pelaksanaan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu hal yang vital dalam mendukung kemajuan Kota Serang

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Case Study* Creswell. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dapat memberikan sajian penelitian holistic melalui berbagai sumber mengenai isu pendidikan di Kota Serang. Fokus penelitian yang coba penulis angkat mengarusutamakan pada Implementasi Kebijakan Pendidikan Studi Kasus Program Aje Kendor Sekolah Kota Serang untuk memberikan gambaran perkembangan pendidikan dapat ditingkatkan dengan bantuan kebijakan pemerintah lewat sumber dana negara dalam bentuk beasiswa yang juga memberikan analisa proses kebijakan ini berjalan.

Pengumpulan data penelitian bersumber pada studi literatur, wawancara dengan *purposive sampling* yaitu Dinas Pendidikan Kota Serang serta penerima beasiswa Aje Kendor Sekolah, dokumentasi dan observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting yang menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah berdasarkan kualitas hidup manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Dikembangkan oleh UNDP dan diadaptasi oleh BPS, IPM mengukur tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil). Penghitungan IPM menggunakan rata-rata geometrik, sehingga ketimpangan pada satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh keunggulan pada dimensi lain. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antardimensi sebagai pondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan (BPS, 2024).

Berdasarkan laporan resmi BPS Kota Serang, IPM pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,48 dan meningkat menjadi 73,99 pada tahun 2024 (BPS Kota Serang, 2024). Lonjakan sebesar 0,51 poin ini merupakan capaian yang cukup signifikan, karena setiap pergerakan indeks menunjukkan perubahan struktural dalam kualitas hidup masyarakat (Raharti dkk, 2020). Dalam klasifikasi BPS, angka IPM antara 70 hingga 80 masuk kategori “tinggi”, sementara angka di atas 80 masuk kategori “sangat tinggi”. Artinya, Kota Serang saat ini telah berada di level pembangunan manusia yang kuat, meskipun belum optimal (Amelia, 2022) serta cerminan keberhasilan berbagai program pembangunan berbasis manusia yang diterapkan dalam kurun waktu setahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan rerata Provinsi Banten tahun 2024 yang mencapai 73,89, capaian IPM Kota Serang sedikit lebih unggul. Namun demikian, perlu dicermati bahwa meskipun IPM meningkat, tantangan pembangunan masih tetap ada, khususnya dalam menjaga konsistensi perbaikan kualitas layanan dasar untuk mengatasi kesenjangan (Hakim dkk, 2024) antar wilayah. Data ini menjadi rujukan penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis bukti (BPS Kota Serang, 2024).

Dimensi kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercermin dari Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Pada tahun 2024, AHH Kota Serang meningkat menjadi 70,85 tahun dari 70,50 tahun pada tahun sebelumnya (BPS Kota Serang, 2024), mencerminkan perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan ini didukung oleh penguatan

layanan kesehatan berbasis komunitas seperti Puskesmas keliling, perluasan cakupan BPJS, dan edukasi kesehatan masyarakat.

Program intervensi spesifik seperti penanganan stunting, pemberian makanan tambahan, imunisasi lengkap, serta layanan posyandu turut mendorong peningkatan kualitas hidup (Haris & Amri, 2024). Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS), konsumsi gizi seimbang, dan pemeriksaan kesehatan rutin juga semakin membaik. Secara keseluruhan, kemajuan di sektor kesehatan ini menjadi pondasi penting bagi produktivitas dan pembangunan manusia (Puspasari, 2020) di Kota Serang.

Dimensi pengetahuan dalam IPM Kota Serang diukur melalui rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Pada 2024, RLS meningkat dari 8,65 menjadi 8,78 tahun, dan HLS dari 13,12 menjadi 13,45 tahun (BPS Kota Serang, 2024). Sebagai cerminan atas peningkatan akses dan retensi pendidikan, didorong oleh program pendidikan. Namun, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan peran Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Jika dibandingkan dengan Kota Tangerang, indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Serang masih tertinggal. Sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, Kota Serang seharusnya mampu mencatatkan angka IPM yang lebih tinggi. Ini menandakan perlunya langkah strategis yang lebih agresif dan terarah untuk mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan potensi kota.

Dalam dimensi pendidikan, visi Walikota tentang “Serang Cerdas” dan “Gerakan Kudu Sekolah” (GKS) menjadi penggerak utama peningkatan partisipasi sekolah. GKS secara khusus menyoal anak-anak dari keluarga tidak mampu dan pekerja sektor informal yang berisiko putus sekolah. Intervensi ini mendorong peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sekaligus mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah. Dengan demikian, GKS berkontribusi nyata pada capaian IPM Kota Serang di dimensi pengetahuan (Dinas Pendidikan Kota Serang, 2024). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, IPM Kota Serang menempati posisi ke-3 tertinggi setelah Kota Tangerang Selatan (82,09) dan Kota Tangerang (78,11). Dengan IPM sebesar 73,99 pada 2024, Kota Serang unggul atas Kabupaten Serang (69,18), Kabupaten Pandeglang (65,92), dan Kabupaten Lebak (66,45) (BPS Provinsi Banten, 2024). Ini menunjukkan bahwa secara regional, Kota Serang berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan manusia di wilayah Banten.

Meskipun IPM Kota Serang menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar. Salah satunya adalah kesenjangan pendidikan antar wilayah, khususnya antara sekolah-sekolah di pusat kota dengan yang berada di daerah pinggiran seperti

Kecamatan Walantaka dan Curug. Rata-rata lama sekolah di kecamatan pinggiran masih di bawah 8 tahun, yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan (BPS Kota Serang, 2024). Dalam konteks ini, keberadaan program seperti GKS menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok-kelompok yang rawan terpinggirkan. Namun, tantangan utama GKS terletak pada konsistensi pendanaan, pengawasan keberlanjutan partisipasi siswa, serta sinergi antar instansi. Untuk menjadikan GKS benar-benar efektif dalam mendongkrak IPM, dibutuhkan sistem monitoring yang kuat dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, khususnya di wilayah dengan angka putus sekolah tinggi.

Peningkatan IPM Kota Serang berkontribusi langsung pada daya saing daerah, khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi kreatif. Masyarakat yang lebih sehat dan terdidik cenderung lebih inovatif, produktif, dan adaptif terhadap teknologi, sehingga menarik minat investor karena tersedianya SDM berkualitas (Zahwa dkk, 2025). Selanjutnya, peningkatan IPM harus dibarengi dengan upaya mengatasi ketimpangan struktural. Pemerintah perlu mengintegrasikan data terpilah dalam perencanaan agar kebijakan lebih tepat sasaran. Program seperti GKS juga perlu diperluas dengan dukungan anggaran yang berkelanjutan dan kemitraan aktif bersama komunitas serta sektor swasta.

Angka Putus Sekolah Kota Serang

Fenomena anak yang tidak bersekolah merupakan masalah pelik yang terus menghantui pembangunan sumber daya manusia di berbagai wilayah Yuningsih (2017), termasuk di kota-kota dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Data yang disajikan dari beberapa kecamatan di kota ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak bersekolah secara keseluruhan mencapai ± 1.752 anak, dengan sekitar ± 1.560 anak sudah terverifikasi oleh pihak berwenang, sementara sisanya ± 192 anak masih menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Distribusi angka ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya sistematis dalam pendataan, tantangan dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang melatarbelakangi putus sekolah masih belum sepenuhnya tuntas.



Gambar 1. Grafik Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Serang (2023-2024)

Sumber: Kemdikbudristek 2024, diolah

Melihat lebih rinci per kecamatan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang memengaruhi fenomena putus sekolah. Kecamatan Curug, dengan jumlah anak tidak sekolah sekitar ± 200 anak, menampilkan alasan utama berupa kondisi ekonomi yang berat dan praktik menikah dini. Faktor ekonomi di sini sangat krusial karena keterbatasan finansial memaksa sebagian keluarga untuk menarik anak-anaknya dari bangku pendidikan (Trivena, 2021) agar mereka bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau bahkan karena ketidakmampuan membiayai biaya sekolah dan kebutuhan pendukung lainnya seperti transportasi dan seragam. Pernikahan dini yang masih terjadi di kalangan anak-anak juga merupakan faktor sosial budaya yang vital (Layli & Prayogo, 2021), karena seringkali menghentikan kesempatan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan (Hardianti & Nurwati, 2020).

Di Cipocok Jaya, dengan ± 300 anak yang tidak bersekolah, alasan yang mendominasi meliputi ketidakminatan terhadap pendidikan, pekerjaan anak di luar jam sekolah, serta faktor ekonomi yang serupa dengan kecamatan Curug. Ketidakminatan anak terhadap sekolah bisa berasal dari pengalaman pendidikan yang kurang menyenangkan (Dewi dkk, 2025), sistem pembelajaran yang monoton, atau bahkan tekanan dari lingkungan sosial (Muttaqin dkk, 2024). Keterlibatan anak dalam pekerjaan, meskipun bersifat parsial, menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi mendesak yang memaksa mereka untuk mengorbankan pendidikan demi penghasilan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah putus sekolah bukan sekadar persoalan pendidikan, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan kemiskinan dan struktur sosial yang tidak mendukung keberlangsungan pendidikan anak (BPS, 2017)

Kecamatan Taktakan juga menampilkan pola serupa, dengan ± 280 anak tidak bersekolah dan alasan utama meliputi menikah muda dan rasa putus asa terhadap sekolah. Selain itu, rasa

putus asa yang bisa muncul dari kegagalan akademik, bullying, atau minimnya dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah menjadi pemicu psikologis yang mematahkan semangat anak-anak untuk bertahan di bangku sekolah. Wilayah Walantaka, yang memiliki jumlah anak tidak sekolah tertinggi yaitu ± 320 anak, mengindikasikan bahwa kendala biaya yang tinggi dan jarak yang jauh ke sekolah menjadi alasan utama. Jarak yang jauh ke sekolah terutama menjadi hambatan bagi anak-anak yang tinggal di kawasan pinggiran (Angglepi dkk, 2025) atau wilayah dengan infrastruktur transportasi yang kurang memadai, sehingga menimbulkan kelelahan dan risiko keselamatan yang tinggi.

Kasemen, dengan jumlah ± 350 anak tidak bersekolah, memperlihatkan faktor dominan berupa kurangnya dukungan orang tua. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari ketidaktahuan orang tua mengenai pentingnya pendidikan, tekanan ekonomi, hingga pola asuh yang tidak optimal. Di Kecamatan Serang, meskipun jumlah anak tidak sekolah tidak sebesar di beberapa kecamatan lain, alasan putus sekolah cenderung lebih kompleks, yakni disabilitas, faktor sosial, dan kondisi ekonomi rendah. Ketidakmampuan sistem pendidikan dalam memberikan layanan inklusif, serta stigma sosial yang masih melekat, menjadi penghalang utama.

Secara keseluruhan, berbagai alasan yang muncul menunjukkan bahwa masalah putus sekolah bersifat multidimensional, melibatkan interaksi antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Faktor ekonomi, sebagai benang merah yang menembus hampir semua wilayah, mengindikasikan bahwa kemiskinan tetap menjadi hambatan utama yang belum mampu diatasi secara tuntas oleh kebijakan publik. Intervensi yang bersifat parsial, seperti pemberian beasiswa atau bantuan langsung tunai, walaupun penting, belum cukup untuk mematahkan keberlanjutan permasalahan ekonomi.

Latar Belakang Program Beasiswa “Aje Kendor Sekolah”

Pendidikan merupakan pilar penting dalam membentuk masa depan masyarakat. Di Kota Serang, pemerintah telah lama menyadari pentingnya membangun generasi yang terdidik dan terampil untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Namun, meskipun telah melakukan berbagai upaya, kota ini masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan angka partisipasi sekolah, retensi siswa, dan motivasi siswa. Faktor-faktor sosial ekonomi, dan dukungan keluarga yang terbatas, semuanya berkontribusi pada meningkatnya angka putus sekolah dan meningkatnya rasa ketidaktertarikan di kalangan siswa.

Ungkapan “Aje Kendor,” yang berakar dari dialek bahasa Jawa dan Banten, diterjemahkan menjadi “Jangan Menyerah” atau “Terus Maju” (Tribunbanten.com, 2021).

Ungkapan ini mewujudkan semangat ketahanan, ketekunan, dan optimisme. Berangkat dari kearifan budaya ini, Pemerintah Kota Serang, melalui Dinas Pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, memprakarsai program “Aje Kendor Sekolah” yaitu sebuah gerakan pendidikan komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi siswa, dan menumbuhkan lingkungan belajar yang positif baik di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal (Serangkota.go.id, 2023).

Program “Aje Kendor Sekolah” bukan hanya sebuah slogan, tetapi sebuah ajakan untuk bertindak bagi seluruh masyarakat. Program ini berupaya untuk mengatasi berbagai hambatan multi-dimensi yang menghalangi siswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka, termasuk kesulitan keuangan, kurangnya motivasi, tantangan yang berkaitan dengan keluarga, dan akses yang tidak memadai ke sumber daya pendidikan. Program ini menyadari bahwa masalah putus sekolah bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan tantangan kolektif yang membutuhkan solusi holistik dan kolaboratif (Serangkota.go.id, 2023).

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk menanamkan rasa memiliki dan tujuan di antara para siswa guna meningkatkan IPM Kota Serang. Melalui program bimbingan, lokakarya motivasi, dan kegiatan pelibatan masyarakat, “Aje Kendor Sekolah” mendorong siswa untuk melihat pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sekolah ini juga menekankan pentingnya keterlibatan dan dukungan orang tua dengan menyelenggarakan forum orang tua dan layanan konseling untuk membantu keluarga dalam menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak mereka (Nurdyono & Budiono, 2012).

Program Gerakan Kudu Sekolah (GTS), yang sebelumnya dikenal dengan nama “Aje Kendor Sekolah”, dikembangkan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sejalan dengan visi dan misi Walikota Serang yang terus berkembang setiap tahunnya. Rebranding program ini mencerminkan pendekatan yang dinamis dan adaptif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka, sambil memastikan bahwa program ini tetap relevan dan responsif terhadap prioritas pembangunan kota.

Secara keseluruhan, Program “Aje Kendor Sekolah” merupakan sebuah inisiatif komprehensif yang berakar pada budaya yang dirancang untuk menumbuhkan ketahanan dan komitmen di antara para siswa di Kota Serang. Program ini mencerminkan visi bersama untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, suportif, dan inspiratif di mana setiap anak diberdayakan untuk mengejar impian mereka tanpa menyerah. Dengan menyelaraskan nilai-nilai masyarakat dengan tujuan pendidikan, Kota Serang bertujuan untuk menciptakan generasi

muda yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga tangguh, optimis, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Formalitas Perencanaan Anggaran Partisipatif serta Peningkatan Pelaksanaan Efisien Guna Menekan Angka Putus Sekolah

Berdasar wawancara dengan staf Dinas Pendidikan Kota Serang mengungkap tata kelola keuangan program Aje Kendor, terutama dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan anggaran. Pengadaan barang dilakukan melalui vendor pihak ketiga, dengan pembayaran langsung dari kas daerah berdasarkan tagihan vendor. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, memisahkan fungsi antara pengguna anggaran dan penyedia jasa guna mengurangi risiko penyimpangan. Namun, rincian penggunaan dana oleh vendor kurang jelas, sehingga efektivitas penggunaan anggaran perlu ditinjau lebih jauh.

Perencanaan program menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan. Pada 2023, dana awal tidak tersedia, sehingga identifikasi kebutuhan masyarakat mengungkapkan beban utama berupa biaya transportasi dan konsumsi harian anak yang tidak dapat dipenuhi. Bantuan terbatas pada penyediaan alat tulis dan pembiayaan pendidikan formal melalui program Indonesia Pintar. Kondisi ini menunjukkan perencanaan yang masih *top-down*, lebih berfokus pada kapasitas anggaran daripada kebutuhan riil masyarakat.

Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan respons program menandakan partisipasi masyarakat belum optimal. Aspirasi mereka hanya menjadi input parsial dalam kebijakan, sehingga program tidak sepenuhnya menyentuh akar permasalahan putus sekolah. Hambatan biaya tidak langsung seperti transportasi dan konsumsi harian yang berpengaruh besar pada akses pendidikan belum terakomodasi.

Meski pengelolaan dana sudah sesuai prosedur dan transparan, efektivitas program dalam menurunkan angka putus sekolah masih terbatas. Kelemahan terletak pada kurangnya integrasi data terpilah dan pendekatan lintas sektor yang responsif terhadap kompleksitas masalah. Untuk itu, diperlukan perencanaan lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal agar program mampu mengatasi kendala struktural yang dihadapi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Mekanisme Transparansi Pelaporan Program ‘Aje Kendor Sekolah’

Proses serah terima bantuan dalam program “Aje Kendor Sekolah” merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun sistem pelaporan yang transparan dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, distribusi perlengkapan sekolah atau bentuk bantuan lainnya tidak dilakukan secara informal, melainkan melewati prosedur resmi yang terdokumentasi. Langkah ini

memberikan dasar yang kuat untuk akuntabilitas, karena setiap barang yang disalurkan tercatat secara administratif dan legal, salah satunya dengan berita acara resmi yang memuat informasi mendetail tentang jenis barang, jumlah, nama penerima, dan lokasi distribusi untuk menjadi alat kontrol. Berita acara ini ditandatangani oleh pihak pelaksana dan penerima manfaat, yang bertindak sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan kedua belah pihak.

Dokumentasi serah terima ini menjadi rujukan utama dalam laporan realisasi program. Jika suatu saat ditemukan ketidaksesuaian atau aduan dari masyarakat, berita acara tersebut dapat ditelusuri kembali sebagai bukti sah pelaksanaan. Di samping fungsi administratif, dokumentasi serah terima juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kredibilitas instansi pelaksana (Dinas Pendidikan Kota Serang, 2024). Masyarakat yang menerima bantuan akan merasa lebih dihargai ketika seluruh proses dijalankan secara formal dan transparan.

Hal ini pada akhirnya membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang menjadi modal penting dalam pelaksanaan program berbasis partisipasi seperti GKS (Gerakan Kudu Sekolah). Dengan cara ini, kontrol awal pelaporan anggaran tidak hanya dilakukan secara teknis oleh aparat pengawas, melainkan dimulai dari titik paling dasar yaitu proses penyaluran. Prinsip ini memperkuat bahwa akuntabilitas bukan hanya urusan lembaga pengawas, tetapi melekat pada seluruh rantai pelaksanaan program.

Kolaborasi *Stakeholder* sebagai Manifestasi Pengawasan Akuntabel Program Aje Kendor Sekolah

Dalam siklus manajemen program publik, pelaksanaan audit menjadi komponen vital untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sebagaimana mestinya. Di Kota Serang, sistem audit terhadap program “Aje Kendor Sekolah” dilakukan secara berlapis, yaitu melalui audit internal oleh Inspektorat Daerah dan audit eksternal oleh lembaga independen seperti BPK atau BPKP. Audit internal oleh Inspektorat Kota Serang berperan sebagai mekanisme pengawasan pertama yang bekerja secara rutin. Mereka memverifikasi dokumen pelaksanaan, mengecek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, dan melakukan investigasi jika ditemukan indikasi penyimpangan sebagai bentuk fungsi preventif dan korektif untuk mencegah kerugian.

Sementara itu, audit eksternal dari BPK atau BPKP memberikan dimensi objektivitas yang lebih luas karena bersifat independen. Laporan audit ini seringkali menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan pengawasan politik, sekaligus menjadi rujukan dalam proses evaluasi program oleh publik dan media. Keberadaan dua level audit ini menunjukkan sistem *check-and-balance* yang sehat. Pemerintah tidak hanya menggantungkan pada satu instrumen pengawasan, tetapi membangun jaringan pengawasan yang menyeluruh. Ini juga menjadi

sinyal positif bagi masyarakat dan mitra pembangunan (seperti NGO dan pihak swasta) bahwa dana publik dikelola dengan tanggung jawab dan transparansi.

Aspek pencatatan keuangan sering kali dianggap teknis, tetapi sejatinya merupakan fondasi dari sistem transparansi. Dalam program “Aje Kendor Sekolah”, semua transaksi pengadaan dan pembelanjaan didasarkan pada memo internal yang mendetail, mulai dari memo perintah pelaksanaan kegiatan, permintaan barang, hingga persetujuan pembayaran. Memo ini menjadi dokumen dasar dalam mengarsipkan seluruh jejak keuangan program. Setiap memo mencantumkan informasi penting seperti nomor dokumen, tanggal dikeluarkan, jenis pengeluaran, pihak yang mengusulkan, dan pihak yang menyetujui. Kombinasi data tersebut memungkinkan proses audit menjadi lebih efisien karena dapat ditelusuri dari hulu ke hilir. Tidak ada transaksi keuangan yang bisa terjadi tanpa adanya memo atau surat pengantar resmi, sehingga peluang penyelewengan dapat ditekan seminimal mungkin. Lebih lanjut, pencatatan memo juga digunakan sebagai instrumen koordinasi antar divisi di dalam dinas.

Pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan dalam penggunaan anggaran publik. Untuk menghindari praktik tidak transparan, Dinas Pendidikan Kota Serang menggunakan mekanisme kerjasama dengan vendor pihak ketiga yang telah melalui proses seleksi dan pengadaan resmi sesuai regulasi. Dalam konteks program “Aje Kendor Sekolah”, pendekatan ini digunakan terutama dalam penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa penerima manfaat. Vendor yang ditunjuk tidak menerima pembayaran di muka, melainkan harus terlebih dahulu menyediakan barang sesuai kontrak, melakukan pengiriman ke lokasi, dan melampirkan bukti serah terima (Permendagri No. 70 Tahun 2019).

Setelah proses ini diverifikasi dan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), baru kemudian pembayaran dilakukan. Skema ini meminimalisasi risiko pembayaran fiktif atau pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi. Model kerja seperti ini juga mempertegas tanggung jawab hukum vendor. Bila terdapat barang yang rusak, kurang, atau tidak sesuai spesifikasi, maka vendor bertanggung jawab penuh untuk mengganti tanpa beban tambahan kepada pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan pihak ketiga juga membantu mempercepat distribusi karena vendor memiliki kapasitas logistik yang mumpuni. Hal ini memberi ruang bagi dinas untuk fokus pada fungsi pembinaan, pemantauan program, serta verifikasi kualitas layanan pendidikan.

Dalam tata kelola keuangan daerah, tidak semua anggaran yang dialokasikan untuk suatu program akan habis digunakan. Pada banyak kasus, seperti dalam pelaksanaan “Aje Kendor Sekolah”, sering kali terdapat efisiensi anggaran yang memungkinkan dana tidak terserap sepenuhnya. Ketika hal ini terjadi, mekanisme resmi pengembalian dana ke Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberlakukan. Prosedur pengembalian ini dilakukan melalui laporan realisasi anggaran dan dikawal oleh bagian keuangan pemerintah daerah. Setelah dilakukan verifikasi bahwa dana tidak terserap sesuai DPA, maka kelebihan tersebut akan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban dan dikembalikan ke kas daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan daerah yang mengatur secara terperinci penggunaan dana publik. Dalam konteks program “Aje Kendor Sekolah”, DPA menjadi dokumen formal yang mengatur seluruh rencana kegiatan, output yang ditargetkan, serta rincian alokasi dana untuk masing-masing pos belanja. Tanpa DPA, tidak ada aktivitas yang bisa dijalankan secara legal karena semua pembelanjaan harus merujuk pada dokumen ini. DPA disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di dalamnya terdapat rincian kegiatan seperti pengadaan perlengkapan sekolah, pelatihan guru, dan biaya operasional yang mendukung kelangsungan program. Semua nilai rupiah yang dicantumkan di DPA merupakan hasil dari proses perencanaan yang memperhatikan kebutuhan lapangan serta kemampuan fiskal daerah.

DPA juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan program. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan kode rekening dan volume kegiatan yang ada dalam DPA. Jika terjadi perbedaan, misalnya pengalihan anggaran dari satu jenis kegiatan ke kegiatan lain, maka hal itu harus melalui proses perubahan anggaran (revisi DPA) dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dalam pelaksanaan di lapangan, DPA menjadi acuan tidak hanya bagi dinas, tetapi juga bagi pihak ketiga yang terlibat seperti vendor. Dengan demikian, DPA bukan hanya dokumen internal, melainkan juga bagian dari mekanisme transparansi yang memungkinkan semua pihak yang terlibat serta mengetahui batasan dan tanggung jawab yang akan menjadi basis analisis kesesuaian realisasi anggaran oleh BPK maupun Inspektorat.

Salah satu indikator keberhasilan dari program publik adalah sejauh mana pelaksanaannya konsisten dengan perencanaan. Dalam program “Aje Kendor Sekolah”, hasil wawancara dengan pelaksana dan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu pelaksanaan, alur distribusi bantuan, maupun capaian target partisipasi siswa. Hal ini menandakan bahwa sistem pelaporan dan pengawasan yang dibangun sudah cukup solid dan fungsional. Kesuksesan implementasi ini tidak terlepas dari adanya koordinasi lintas sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah-sekolah penerima, hingga keterlibatan masyarakat melalui forum orang tua. Proses distribusi perlengkapan sekolah dilakukan tepat waktu, kegiatan

motivasi siswa berjalan sesuai jadwal, dan layanan non-formal berjalan paralel bagi siswa yang tidak bisa mengikuti sekolah formal. Semua ini merupakan hasil kerja yang terstruktur berdasarkan perencanaan yang matang.

Meskipun pelaporan sudah dilakukan secara periodik, namun sistem pelacakan langsung terhadap kehadiran siswa penerima manfaat atau efektivitas sesi motivasi belum sepenuhnya responsif. Hal ini penting agar respon terhadap tantangan di lapangan bisa lebih cepat dan berbasis data terkini. Keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting yang masih perlu diperkuat. Sejauh ini, pelibatan orang tua siswa dan tokoh masyarakat sudah ada, tetapi masih bersifat segmental dan belum terintegrasi dalam sistem pengawasan yang formal. Bila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam forum monitoring, maka potensi penyimpangan bisa lebih cepat diketahui dan diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Secara umum, implementasi program yang konsisten dengan perencanaan merupakan pencapaian yang layak diapresiasi. Namun keberhasilan ini perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sistem pelaporan dan pengawasan agar keberhasilan tersebut tidak bersifat sesaat, tetapi bisa dijadikan standar operasional dalam program-program berikutnya.

Salah satu kekuatan utama dari program “Aje Kendor Sekolah” adalah desainnya yang tidak bersifat temporer, melainkan dirancang sebagai program berkelanjutan. Hal ini penting mengingat isu putus sekolah adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa diatasi dalam satu siklus anggaran. Oleh karena itu, aspek pelaporan dan pengawasan juga harus bersifat jangka panjang, mencakup *review* berkala atas capaian, tantangan, serta efektivitas dari penggunaan anggaran yang tersedia. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan tahunan atau pengawasan administratif; dibutuhkan sistem yang bisa menangkap perubahan di lapangan secara cepat dan akurat. Contohnya, jika angka partisipasi siswa turun di salah satu kecamatan, maka sistem harus bisa mengidentifikasi penyebabnya secara *real-time* dan menawarkan intervensi yang sesuai.

Program berkelanjutan juga menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan. Dinas Pendidikan harus terus membina hubungan dengan sekolah, PKBM, dan *stakeholder* lainnya agar ekosistem pendidikan tetap aktif. Dalam jangka panjang, pelibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk mendukung keberlangsungan finansial dan sosial program. Dengan cara ini, beban anggaran tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Selain itu, keberlanjutan menuntut adanya evaluasi reguler terhadap strategi yang digunakan. Maka dari itu, pelaporan harus tidak hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga evaluasi kebijakan berdasarkan indikator keberhasilan yang relevan dengan konteks waktu.

Bingkai Standar dan Sasaran Kebijakan Beasiswa “Aje Kendor Sekolah” dalam Dominasi Angka Putus Sekolah Kota Serang

Permasalahan mengenai minimnya masyarakat yang dapat mengemban pendidikan di tengah dunia yang semakin maju, Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten perlu untuk menjawab permasalahan tersebut yang tertuang dalam data rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) oleh BPS Kota Serang yang mencatat bahwa RLS 2023 menyentuh angka 8,65 tahun. Minimnya lama rata-rata sekolah masyarakat Kota Serang cerminan atas ketidakmampuan untuk dapat menamatkan wajib sekolah yang telah diatur selama 12 Tahun oleh pemerintah Nasional (Margiyanti & Maulia, 2023). Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki kontrak sosial dalam menjawab permasalahan dan menjamin kesejahteraan masyarakat (Wicaksono, 2021; Nagaring dkk, 2021; Alrah, 2022) salah satunya jaminan akses terhadap pendidikan perlu menuangkan dalam kebijakan yang sifatnya mengikat.

Jawaban atas permasalahan pendidikan masyarakat Kota Serang tertuang dalam konsep implementasi kebijakan di bidang pendidikan dengan hadirnya program ‘Aje Kendor Sekolah’ pada tahun 2023 yang kemudian bertransformasi menjadi ‘Gerakan Kudu Sekolah’. Dalam implementasi tersebut guna mengoptimalkan manfaat dan tujuannya perlu adanya standarisasi serta sasaran yang rigid (Salama, 2023; Sos, 2020; Yetti dkk, 2023) terutama di tengah keterbatasan anggaran (Suhartono, 2021), sehingga sasaran atas kebijakan perlu mengedepankan filterisasi yang konkret (Suharno, 2021) untuk mencegah ketidakefektifan *output* atas kebijakan tersebut. Standarisasi dalam program beasiswa “Gerakan Kudu Sekolah” menempatkan pengembalian anak-anak yang telah terputus sekolah serta anak rentan putus sekolah. Skema ini bentuk penanggulangan serta penanganan permasalahan akses terhadap pendidikan, sehingga kedepannya Kota Serang dapat secara perlahan keluar dalam jurang ketertinggalan.



Gambar 2. Kunjungan Pemerintah Terhadap Masyarakat Putus Sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2023

Dalam konteks program Beasiswa ‘Aje Kendor Sekolah’ pemerintah Kota Serang membagi sasaran kebijakan di tingkat SD, SMP, serta SMA sebagai bentuk untuk meningkatkan lama sekolah yang terhenti rata-rata pada saat Sekolah Menengah Pertama. Dimulai saat Sekolah Dasar untuk memberikan Insentif melanjutkan ke tingkat lanjutan, sehingga ketika SMP siswa/i memiliki rasa aman atas jaminan permasalahan terkait biaya transportasi dan keperluan sekolah untuk mencegah pemberhentian keinginan dalam melanjutkan sekolah. Hasil atas proses panjang sejak Sekolah Dasar kebijakan ini diterapkan, untuk merangsang keinginan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan regulasi nasional selama 12 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat.

Kemudian, penentuan penerima secara spesifik pemerintah tertuju pada Anak Putus Sekolah (ATS) melalui kunjungan secara langsung pada masyarakat guna mengatasi permasalahan putus sekolah sehingga kebijakan tidak salah dalam memberikan obat bagi penyakit dibidang pendidikan. Tetapi, permasalahan lain mengenai ketidakinginan untuk kembali ke sekolah atas kepentingan ekonomi untuk bekerja yang berimplikasi pada perubahan atas alokasi anggaran menjadi Anak Rentan Putus Sekolah (ARPS) sebagai bentuk standarisasi yang dinamis guna memaksimalkan pemberantasan permasalahan pendidikan.

Tabel 1. Sampel Penerima ARPS & ATS Tingkat SD, SMP, dan SMA

Wilayah	Jenjang		
	SD	SMP	SMA
Cipocok Jaya	-	3	8
Curug	-	-	1
Serang	9	8	6
Taktakan	1	-	2
Walantaka	16	9	16

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2023, diolah

Sedangkan penentuan ARPS bergantung pada kerjasama antara pemerintah dengan sekolah untuk mengolektifkan siswa/i yang tidak mampu dalam konteks bantuan sekolah secara formal berbentuk barang. Hal ini juga sebagai artikulasi permasalahan terkait penyalahgunaan dana bantuan sekolah sehingga meminimalisir penggunaan diluar kepentingan pendidikan. Berdasarkan pemaparan diatas standarisasi kebijakan menyentuh penanggulangan serta penanganan permasalahan putus sekolah serta sasaran yang mengkolaborasikan antara ATS dan ARPS guna optimalisasi implementasi kebijakan di bidang pendidikan.

Inklusifitas Badan Pelaksana: Kolaborasi Birokrasi dan Non-Formal Aktor dalam Menekan Angka Putus Sekolah Kota Serang

Kebijakan beasiswa pendidikan Kota Serang terlaksana atas kolaborasi berbagai aktor untuk melengkapi dengan bersandar pada kompetensi masing-masing badan pelaksana. Program yang semulanya menggandeng pihak swasta secara penuh dalam pendanaan yaitu Baznas Kota Serang serta Bank Jawa Barat (BJB) serta birokrasi sebagai pemilik data masyarakat bergeser menjadi kolaborasi untuk memenuhi ketidakmampuan pihak swasta. Kolaborasi antar badan pelaksana ditunjukkan sebagai pemenuhan atas kebutuhan implementasi program.

Gambar 3. Tim Gerakan dan Kelompok Kerja Aje Kendor Sekolah

SUSUNAN TIM GERAKAN AJE KENDOR SEKOLAH DAN KELOMPOK KERJA	
Pembiayai	: Wali Kota Serang
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Serang
Ketua 1	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Ketua 2	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
Wakil Ketua 1	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
Wakil Ketua 2	: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Sekretaris	: Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Bendahara	: Wakil Ketua II Badan Kota Serang
Anggota	: a. Kelompok Kerja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan : 1. Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 5. Penilik dan Koordinator Pengawas SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 6. Ketua Program Studi Kependidikan Non Formal FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 7. Ketua Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri "ISMP" Banten; dan 8. Ketua Yayasan Disabilitas Kota Serang. b. Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang: 1. Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang; 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 5. Penilik dan Koordinator Pengawas SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 6. Ketua Program Studi Kependidikan Non Formal FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 7. Ketua Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri "ISMP" Banten; dan 8. Ketua Yayasan Disabilitas Kota Serang.

Sumber: SK Walikota Serang, 2023

Melalui runtutan yang panjang birokrasi mengandalkan dana Program Indonesia Pintar dari tingkat nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri sistem birokrasi yang panjang masih menjadi bagian penting dalam setiap implementasi kebijakan salah satunya program 'Aje Kendor Sekolah', tetapi setiap elemen dalam proses implementasi ini memposisikan diri sesuai dengan tupoksi yang dimiliki seperti kunjungan terhadap masyarakat secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, pihak sekolah sebagai agen pembantu filterisasi penerima sesuai standar, serta LSM sebagai karakteristik inklusifitas pelaksanaan sehingga program dapat secara riil manifestasi atas jawaban permasalahan yang ada di masyarakat dengan melibatkan secara aktif dari berbagai lapisan untuk mencapai implementasi kebijakan yang optimal.

Gambar 4. Tantangan Penanganan ATS & ARTS

Bab / Sub Bab	Tantangan & Solusi	Siapa
Kapasitas layanan pendidikan dasar dan menengah	- Semua table belum terisi data - Operator Dapodik mengisi berdasarkan data 2022/2023	Operator Dapodik
ATS di Kota Serang	- Terkait target, velum <u>verval tidak bisa diisi</u> - Menunggu <u>verval dan memutakhirkan</u>	Pokja Pendataan
Penyebab ATS	- Terkait target, velum <u>verval tidak bisa diisi</u> - Menunggu <u>verval dan memutakhirkan</u>	Pokja / Fasilitator ERAT

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Kendati demikian, permasalahan terkait kemampuan birokrasi dalam menyediakan layanan dasar masih mengalami tantangan cukup signifikan terutama dalam verifikasi data penerima. Hal ini juga cerminan atas karakteristik badan penyelenggara yang belum secara merata dapat menggunakan dan mengakses teknologi guna memudahkan pelayanan. Selain itu, keikutsertaan forum PKBM Kota Serang belum terlihat secara optimal dalam proses penyelenggaraan program hal ini dikarenakan konseptualisasi program yang fokus pada pemberian barang semata sehingga pihak vendor dan pemerintah menjadi lebih dominan.

Oleh karena itu, karakteristik badan pelaksana dalam konteks implementasi program “Gerakan Kudu Sekolah” telah selaras dengan tujuan dan kebutuhan program sehingga kedepannya kekurangan yang masih terjadi dapat terselesaikan dengan komitmen antar *stakeholder* dan penempatan masyarakat yang lebih aksesibel terhadap implementasi.

Kesesuaian Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik Kota Serang dengan Program “Aje Kendor Sekolah”

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di sekitarnya salah satunya Di Kota Serang dalam program “Aje Kendor Sekolah” yang diinisiasi sebagai respon strategis terhadap meningkatnya angka putus sekolah, guna melihat kesesuaian program dengan realitas berbagai spektrum kondisi di Kota Serang dapat termanifestasi sebagai berikut:

Jika melihat pada kondisi ekonomi, kesulitan ekonomi merupakan hambatan utama yang menjadi penghalang terhadap pendidikan di Kota Serang. Banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit untuk memprioritaskan pendidikan. Survei lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa siswa sering kekurangan sumber daya penting seperti transportasi, uang saku sekolah, biaya pendidikan dan alat sekolah. Meskipun Pemerintah melalui Program ‘Aje Kendor Sekolah’ telah memenuhi beberapa kebutuhan melalui penyediaan perlengkapan sekolah melalui APBD dan bantuan biaya pendidikan diinisiasikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu program nasional, masih ada kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terakomodasi, terutama terkait transportasi dan uang saku harian, dikarenakan keterbatasan anggaran.

Faktor-faktor sosial semakin memperumit lanskap pendidikan yang ada di Kota Serang. Survei pemerintah menemukan sejumlah besar anak berasal dari keluarga yang orangtuanya bercerai, tidak diasuh oleh kedua orangtuanya, tidak mampu, dituntut bekerja untuk memenuhi hidup sehingga tidak ada waktu untuk berpendidikan. Keadaan ini berkontribusi pada tingginya angka Anak Putus Sekolah (APS). Sebagai tanggapan, Dinas Pendidikan telah berkolaborasi

dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menawarkan program pendidikan non-formal yang mengakomodasi kondisi yang terjadi di masyarakat Kota Serang, yang memungkinkan mereka untuk menghadiri kelas secara bersyarat.

Gambar 5. Surat Keputusan Wali Kota Serang



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (2025)

Secara politis, inisiatif ini mendapat dukungan kuat dari pimpinan kota. Walikota Serang meresmikan program ini dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk membentuk tim gerakan “Aje Kendor Sekolah”, yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Kota Serang. Dukungan politik ini sangat penting dalam melegitimasi program dan memobilisasi sumber daya untuk implementasinya.

Sikap Pelaksana dalam Implementasi Program Beasiswa “Aje Kendor Sekolah”

Sikap dan komitmen para pelaksana, administrator, dan pejabat daerah sangat penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Di Kota Serang, para pelaksana khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pendekatan proaktif dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat untuk nantinya dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Padahal saat itu mereka tidak diberikan uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu surat tugas pejabat negara, PNS, pegawai tidak tetap atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas, untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan. Keterlibatan langsung ini menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dan kemauan untuk menyesuaikan strategi dari adanya program tersebut dengan tantangan nyata yang terjadi di masyarakat Kota Serang.

Namun, keterbatasan sumber daya dan kendala sistemik menjadi tantangan tersendiri. Meskipun para pelaksana berdedikasi tinggi, terdapat ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan yang teridentifikasi, seperti uang saku harian untuk siswa, ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Terlepas dari rintangan-rintangan tersebut, kemampuan beradaptasi para pelaksana terlihat dari kolaborasi mereka dengan PKBM dan melakukan pergeseran ke arah pendidikan yang lebih fleksibel, yaitu menyesuaikan kepada kebutuhan masyarakat, ini menunjukkan disposisi yang kuat untuk mencapai tujuan program yang nantinya akan diimplementasikan melalui Program 'Aje Kendor Sekolah'.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pengelolaan keuangan program Aje Kendor Sekolah telah memenuhi unsur formalitas dan prinsip dasar PFM (*Public Financial Management*), namun belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas masalah pendidikan di Kota Serang. Perencanaan masih *top-down* dan terbatas oleh anggaran, sedangkan pelaksanaan menunjukkan akuntabilitas melalui kerja sama dengan vendor serta pelaporan berbasis dokumen resmi. Meski audit dilakukan berlapis, efektivitas program dalam menurunkan angka putus sekolah masih belum optimal karena belum menjangkau hambatan struktural seperti transportasi, konsumsi harian, dan ketimpangan wilayah. Keterlibatan masyarakat dan sekolah dalam pengawasan juga masih perlu diperkuat. Penulis menyadari penelitian ini diperlukan data lebih kompleks guna menganalisa spektrum transparansi keuangan sehingga kedepannya dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan dan peningkatan inklusifitas peran *stakeholder* serta monitoring dan evaluasi berbasis kemajuan teknologi secara berkala guna mencapai optimalisasi pemberdayaan masyarakat dengan program pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. H. (2013). *The international handbook of public financial management*. Palgrave Macmillan.
- Alrah, Z. (2022). Kontrak sosial dalam pandangan Rousseau. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 1(01).

- Amelia, S. (2022). Klasterisasi kabupaten/kota berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia dengan metode average linkage (studi kasus: Provinsi Banten). *MathVision: Jurnal Matematika*, 4(2), 69–74.
- Angglepi, M. S., Susanti, E., & Haironi, N. (2025). Tantangan mobilitas pelajar di seberang Sungai Kampar Kiri dalam menempuh pendidikan. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 757–764.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Analisis kemiskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. (2024). *Indeks pembangunan manusia Kota Serang*.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2023). *Indeks pembangunan manusia Kota Serang, 2022*. BPS Kota Serang.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. Vicki Knight.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (Cet. 1). Pustaka Belajar.
- Devi Aliva, & Ilhamsyah, F. (2021). Efektivitas alokasi anggaran pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(8), 476–481.
- Dewi, R. P., Ramadhani, R., Rahayu, R. A., & Suriani, A. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 304–319.
- Gaol, N. T. L. (2023). *Teori dan model manajemen pendidikan: Sebuah kajian fundamental*. PT Scifintech Andrew Wijaya.
- Hakim, C. B., Pornomo, J., & Iman, N. (2024). Evaluasi beban kerja staf administrasi dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan akademik. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*, 5(2), 43–51.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Haris, A., & Amri, M. (2024). Peran zakat dalam mengatasi stunting dan gizi buruk di Kabupaten Brebes. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 1–30.

- Herawan, N. S., Putri, S. D., Julianti, S., & Ariesmansyah, A. (2023). Collaborative governance dalam upaya peningkatan indeks mutu pendidikan di Jawa Barat melalui program sekolah gratis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 324–333.
- Herlambang, Y. T. (2021). *Pedagogik: Telaah kritis ilmu pendidikan dalam multiperspektif*. Bumi Aksara.
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model perumusan kebijakan pendidikan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan: Perencanaan anggaran, peraturan, koordinasi (literature review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152.
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena sosial pernikahan dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14(2), 171–184.
- Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan pendidikan implementasi program wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208.
- Muttaqin, A. I., Susilowati, E., & Rasalwati, U. H. (2024). Terapi realitas dengan modeling pada anak rentan putus sekolah di Yayasan Usaha Mulia Cipanas Cianjur. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)*, 6(2).
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2).
- Nurdyana, H. S., & Budiono, B. (2012). *Pendidikan dan kemiskinan: Studi kasus Provinsi Maluku Utara*. Universitas Padjadjaran.
- Pemerintah Kota Serang. (2023, Juli 26). Bersama USAID, Pemkot Serang susun program Aje Kendor Sekolah. *Serang Kota*. <https://serangkota.go.id/detailpost/bersama-usaid-pemkot-serang-susun-program-aje-kendor-sekolah>
- Puspasari, D. (2020). Analisis pengaruh pendidikan, kesehatan dan upah terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 65–76.
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspective)*, 6(1), 36–53.
- Sadiah, H., Ikhsan, M. N., Rahmah, D. F., & Setiawan, F. (2023). Faktor fundamental perumusan kebijakan pendidikan. *Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*, 11(02), 85–95.

- Salama, S. U. (2023). Implementasi kebijakan tentang pedoman standar pelayanan pengguna jasa di Bandar Udara Oesman Sadik Labuha. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 7(2), 236–249.
- Shelvy, S. H., Amirudin, S., & Budiati, A. (2024). Evaluasi program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kota Serang. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 345–356.
- Smart, A. (2020). *Anak cacat bukan kiamat: Metode pembelajaran & terapi untuk anak berkebutuhan khusus* (Cet. 2). Katahati.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Suharno, M. S. (2021). *Pendidikan multikulturisme: Konsep, tata kelola, dan praktik penyelesaian konflik multikultural* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19.
- Tribun Banten. (2021, Mei 19). Mengenal slogan Kota Serang 'Aje Kendor', apa artinya? *Tribun Banten*. <https://banten.tribunnews.com/2021/05/19/mengenal-slogan-kota-serang-aje-kendor-apa-artinya>
- Trivena, T. (2021). Biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi, seberapa besar dampaknya? *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 10(3), 51–56.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahyudin, U. R. (2020). *Manajemen pendidikan (Teori dan praktik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional)*. Deepublish.
- Wicaksono, T. (2021). Bentuk tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional anak terlantar: Analisis teori kontrak sosial. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 235–248.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732.
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551.
- Yuningsih, Y. (2017). *Perlindungan sosial pekerja anak*. Pandiva Buku.
- Zahwa, A., Safitri, R. D., Pratiwi, A. N. R., & Subiakto, V. S. N. (2025). Meningkatkan daya saing bangsa: Peran strategis investasi pendidikan dalam pengembangan SDM. *Indonesian Journal of Education*, 2(1), 150–155.